

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang, sehingga terus menerus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, yakni melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur. Contoh, tersedianya jalan-jalan (baik jalan biasa maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain seperti pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum, infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi.

Saat infrastruktur dalam sebuah wilayah tersebut tercukupi dan memenuhi syarat, maka wilayah tersebut mampu mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan Produk Domestik Bruto serta menurunkan tingkat pengangguran.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur tersebut membuat Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur tersebut membutuhkan suatu dana yang sangat besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ironisnya, bahwa

kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana untuk menyediakan infrastruktur jauh dari kata cukup. Sebagai gambaran Pemerintah memiliki target pembiayaan infrastruktur selama tahun 2009-2014 (untuk memenuhi *Millenium Development Goal* pada tahun 2015) adalah sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah, sementara kemampuan pendanaan Pemerintah sendiri melalui APBN selama 5 tahun diprediksikan hanya mencapai sekitar 400 triliun rupiah.

Dalam hal indikator infrastruktur, Indonesia mengalami penurunan dan posisi Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Beban listrik yang besar terpusat di Pulau Jawa dan Bali, sementara di pulau-pulau besar lainnya mengalami kekurangan listrik yang sangat besar. Jalan raya perkotaan sudah terlalu padat dan jalan bebas hambatan yang baru yang diharapkan akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tahap perencanaan.

Rasio penduduk yang memiliki akses terhadap air pipa sebenarnya sudah mengalami penurunan akibat penutupan sejumlah fasilitas dan karena pertumbuhan penduduk. Bagaimanapun, pada masa lalu Indonesia pernah mengungguli Thailand, Taiwan, China, dan Sri Lanka dalam *Global Competitiveness Report's 1996* tentang Indeks Mutu Infrastruktur secara keseluruhan. Pada 2002, negara-negara ini telah mampu melampaui Indonesia (Bank Dunia, 2007:80).

Sektor air bersih dan listrik yang sangat vital mengalami krisis. Kurangnya kapasitas dan daya listrik serta memburuknya layanan air pipa adalah akibat dari tingkat investasi yang rendah selama satu dekade. Penyediaan sambungan kepada konsumen di wilayah Indonesia bagian timur yang memerlukan biaya lebih tinggi

terkendala oleh tarif listrik yang seragam bersifat regresif dan tidak memberikan insentif (Bank Dunia, 2007:81).

Salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Terpilihnya Provinsi Jawa Tengah ini karena pada tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur untuk merehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur mencapai nilai sekitar Rp 1.000 triliun dalam lima tahun atau rata-rata sebesar Rp 200 triliun per tahun. Selain itu, pihak pemerintah pusat telah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun jalan Jalur Lintas Selatan (JLS). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain telah merencanakan pembangunan JLS tersebut juga telah memulai persiapan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan perluasan Bandara A Yani untuk menjadi bandara internasional.

Berdasarkan hal tersebut, di tingkat daerah alokasi anggaran untuk infrastruktur terus meningkat, namun temuan studi KPPOD memperlihatkan bahwa peningkatan anggaran tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Korupsi dipandang sebagai biang keladi dari ketidaksinkronan antara peningkatan anggaran dengan kualitas infrastruktur. Kenyataan lain bahwa selama ini ketersediaan infrastruktur justru masih menjadi kendala utama bagi aktivitas usaha di Indonesia. Di sisi lain, peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur dituntut melalui berbagai skema. Sayangnya ada sejumlah daerah yang mengalihkan tanggung jawab penyediaan infrastruktur tersebut kepada pihak swasta (melalui Peraturan Daerah) dengan alasan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Namun sayang pengalihan tanggung jawab

tersebut tidak diikuti kompensasi terhadap swasta yang menyediakan kontribusi yang sudah diberikan, malahan justru sanksi bila pihak swasta tidak sanggup melaksanakannya.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kelayakan infrastruktur yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penilaian para praktisi dan akademisi teknik sipil.

### **1.2. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimanakah kelayakan infrastruktur yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penilaian para praktisi dan akademisi teknik sipil?".

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelayakan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penilaian para praktisi dan akademisi teknik sipil.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi: pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal bus, stasiun KA, rel kereta api, jembatan dan jalan (antar provinsi), jembatan dan jalan (kota dan kabupaten), dam dan irigasi, air bersih, buangan air kotor, buangan sampah, listrik, obyek/fasilitas pariwisata,

buangan limbah industri, sekolah/universitas, telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan pada kajian kelayakan infrastruktur berdasarkan penilaian para praktisi dan akademisi teknik sipil.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

### **1.6. Keaslian Tugas Akhir**

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.